

Tapal Kuda Bergolak: Suatu Kajian Tentang Resistensi Terhadap Pelengseran Presiden Gus Dur 2001¹

Abd. Latif Bustami²

Abstraksi

Tulisan ini tentang resistensi masyarakat di tapal kuda terhadap pelengseran Gus Dur tahun 2001. Resistensi terhadap ketetapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melengserkan Gus Dur sebagai presiden terjadi paling besar di wilayah tapal kuda, Jawa Timur. Resistensi itu mengakibatkan terjadinya korban jiwa, bangunan keagamaan, lembaga pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Bangunan keagamaan dan lembaga pendidikan yang direpresentasikan Muhammadiyah dan Amin Rais sebagian besar dihancurkan. Masyarakat tapal kuda mempunyai ciri-ciri, yaitu Madura, Islam 'tradisional', menjadikan kyai sebagai panutan, basis Nahdhatul Ulama, banyaknya pesantren yang diklasifikasikan 'pesantren induk', dan jaringan tarekat Naqsyabandiah wal Qadiriah. Resistensi yang terjadi menunjukkan adanya manipulasi simbol profan oleh elit-elit politik, menjadi simbol sakral. Pelengseran yang berdimensi politik ditarik menjadi konflik berdimensi agama. Konstruksi yang terjadi adalah minna (saya) dan minkum (kamu) yang berdampak pada kawan dan lawan yang harus dihancurkan. Resistensi ini menjadi menarik. Di satu sisi, semangat ukuwah islamiah meningkat, dan di sisi yang lain semangat untuk menghancurkan mendapatkan momentum yang tepat.

Key words: tapal kuda, Madura, kyai, pesantren, resistensi, Nahdlatul Ulama, Muhammdiah

Setiap masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan adab (Suparlan 2000:xviii). Kebutuhan pemenuhan itu bukan hanya berdasarkan untuk dapat melangsungkan hidupnya tetapi berusaha untuk hidup lebih baik. Kenyataan itu sering menimbulkan dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan bukan hanya dikendalikan oleh motif ekonomi dalam perspektif Marxian, melainkan adanya dorongan untuk berkuasa. Russell menyatakan bahwa nafsu berkuasa sebagai penyebab kegiatan-kegiatan yang penting artinya dalam urusan sosial. Kekuasaan itu pada awalnya merupakan kekuasaan atas manusia bukan kekuasaan atas materi, yang selanjutnya merambah pada kekuasaan teknologis atas manusia berdasarkan kekuasaan atas materi (Russell 1988:2-19).

Kenyataan itu menimbulkan persaingan akan berbagai macam sumber daya, yaitu dalam hal penguasaannya, alokasi pendistribusiannya, penggunaan dan pengkonsumsinya. Dalam

¹ Makalah dibentangkan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia IV dalam Panel '(Re-) Constructing Collective Identities and Religious Imaginations in Democratizing Indonesia' dengan Panel Coordinators: Ken Miichi & Yasuyuki Nagafuchi.

² Abd. Latif Bustami adalah Pengajar di Universitas Negeri Malang.



usaha penguasaan sumber daya tersebut terjadi proses persaingan, pertentangan atau konflik, perdamaian serta perserikatan diantara mereka yang terlibat dalam persaingan sumberdaya (Suparlan 1981/1982 : 14). Persaingan itu berlangsung sebagai suatu proses atau bahkan merupakan serangkaian proses yang berjalan terus menerus dalam kehidupan sosial manusia.

Dalam rangka memenangkan persaingan itu pihak-pihak yang berkepentingan mengaktifkan dengan cara mereproduksi keyakinan keagamaan yang sesuai. Pertarungan politik itu memperoleh pembenaran sehingga mengalami pergeseran menjadi 'berperang demi Tuhan' (Armtsrong, 2001). Di sisi lain, elit-elit politik yang tampil dikendalikan oleh elit yang mempunyai kekuasaan relijius atau elit dengan kekuasaan relijius itu yang bertikai sehingga perebutan kekuasaan menjadi semakin kuat (Russell 1988:35-52).

Penggunaan keyakinan keagamaan yang mendapatkan legitimasi konstitusi itu dalam konflik yang terjadi mampu menciptakan atribut-atribut kawan dan lawan yang dilekatkan kepada seseorang. Konstruksi tentang kekuasaan yang berbeda dinyatakan sebagai musuh yang harus dihancurkan (Suparlan, 2001: 23-33). Keyakinan keagamaan merupakan sumber kekuasaan yang mampu memperbesar kekuasaan (Russell 1988: 109-118). Implikasi lebih jauh adalah terbentuknya konstruksi musuh dan kawan sehingga segala atribut akan dilekatkan kepada mereka. Pertarungan kekuasaan antarpara pendukung kekuasaan itu akan melahirkan konflik keyakinan keagamaan. Artinya, sebelumnya konflik itu sebatas pertarungan antarindividu dalam wilayah yang terbatas dengan mengaktifkan keyakinan keagamaan menjadi konflik keyakinan keagamaan. Konflik itu akan menjadi "pertarungan demi Tuhan". Konflik itu merupakan kenyataan dalam sejarah Indonesia. Konflik itu membutuhkan analisis dengan perspektif antropologis. Dalam rangka memenangkan konflik itu sengaja diproduksi dan direproduksi keyakinan keagamaan. Dengan sendirinya akar konflik yang berbasis pertarungan ekonomi, politik, dan sosial menjadi hadir seolah-olah agama atau kekerasan yang dihasilkan minus agama karena ruh keberagaman menjadi tuna makna.

Keyakinan keagamaan digunakan oleh ulama, pemuka agama Islam untuk dipertukarkan dengan kekuasaan. Kekuasaan sebagai hasil pertukaran tersebut dengan sendirinya mendapatkan legitimasi keagamaan yang diyakini sebagai kebenaran tertinggi. Dalam konteks itu yang terjadi adalah keyakinan keagamaan sebagai komoditi politik dan keyakinan keagamaan dijadikan dasar dalam berpolitik. Kerangka berpikir yang pertama adalah



keyakinan keagamaan dijadikan kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan sedangkan yang kedua politik dijadikan kendaraan untuk memperjuangkan keyakinan keagamaan mereka. Keyakinan keagamaan dijadikan legitimasi untuk memperoleh kekuasaan.

Bagi para penganut sesuatu agama, agama yang dianutnya itu adalah sesuatu kebenaran yang mutlak. Ajaran-ajaran yang berupa peraturan-peraturan dan aturan-aturan serta petunjuk-petunjuk yang bersumber pada agama yang dianutnya merupakan suatu pegangan hidup yang diyakini sepenuhnya akan kebenarannya. Dalam menghayati ajaran-ajaran agamanya para penganutnya tidak hanya menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional yang kering tetapi juga melibatkan emosi dan perasaan, sehingga nampaknya para penganutnya tersebut telah menyerahkan keseluruhan jiwa raganya pada agama yang dianut dan diyakini tersebut (Suparlan 1988). Ajaran agama diimplementasikan dalam pranata-pranata sosial (Suparlan 1986; 1995; 2000). Dengan sendirinya ajaran agama yang terwujud melalui proses belajar sehingga terjadi interpretasi dan pemahaman atas seperangkat ajaran-ajaran yang diakui kebenarannya dan penggunaan dalam kehidupan menjadi bervariasi. Agama dioperasionalkan ke dalam berbagai pranata yang dimiliki manusia dalam kehidupan sosialnya untuk sampai menyentuh berbagai kenyataan sosial yang dihadapi manusia sehari-hari.

Agama yang terwujud sebagai keyakinan keagamaan dioperasionalkan ke dalam berbagai pranata politik. Kerangka berpikir itu berimplikasi teoritis bahwa agama merupakan kebudayaan. Dengan sendirinya konsep yang saya gunakan bukan agama melainkan keyakinan keagamaan. Keyakinan keagamaan sebagai kebudayaan itu memberikan corak keyakinan yang beragam. Keragaman itu nampak pada praktek keagamaan, kualitas pemahaman, aliran pemikiran, fiqh, strategi dakwah, emosi-emosi yang menyertainya, komunitas-komunitas keagamaan, dan perubahan-perubahan interpretasi terhadap teks suci. Beberapa penelitian yang menarik untuk membuktikan pernyataan itu adalah orang Islam Jawa di Pare, Kediri (Geertz 1989), keyakinan keagamaan orang Islam Jawa di Suriname (Suparlan 1976, 1995), keyakinan keagamaan orang Islam di Tengger (Hefner 1985). Bahkan, gerakan sosial keagamaan yang dinyatakan 'modernis'³ di Indonesia diinterpretasi dan mengalami kontekstualisasi dengan berpedoman pada kebudayaan mereka. Khusus, temuan penelitian Hefner (1985) di Tengger Pasuruan yang menyatakan Tengger merupakan

3 Istilah modernis dinyatakan untuk menyebut gerakan yang memurnikan ajaran Islam dari takhayul, bid'ah, dan khurafat (TBC), seperti Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Persis. Nahdatul Ulama (NU) dinyatakan sebagai gerakan tradisional. Istilah itu mendapatkan berbagai kritikan karena NU sudah melampaui batas-batas tradisinya, melakukan purifikasi adat dengan gerakan kultural.



keyakinan keagamaan Hindu Jawa perlu dikoreksi karena mereka adalah pemeluk agama Tengger.

Dalam konteks kesejarahan, tumbuh dan berkembangnya Islam diidentikkan dengan pentingnya peran ulama sebagai pewaris nabi. Permasalahan muncul ketika ulama dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna dan terjadi reduksi sehingga menjadi Kyai. Konsep kyai menjadi melembaga melalui pranata pesantren dan doktrin-doktrin teologis melalui dakwah.

Agama yang kemudian menjadi keyakinan keagamaan sebuah masyarakat atau orang per orang, maka agama tersebut menjadi kebudayaan masyarakat atau orang per orang tersebut (Suparlan 2000:xix). Kemudian, keyakinan keagamaan itu diajarkan dalam pranata keluarga melalui proses belajar sehingga terjadi interpretasi dan pemahaman atas seperangkat ajaran (Suparlan 1988:ii-ix). Bourdieu menegaskan bahwa keluarga menjadi basis strategi pokok dalam reproduksi, tidak saja biologis, melainkan juga melalui pewarisan, pendidikan, investasi ekonomi dan reproduksi sosial (Haryatmoko 2003: 15-16). Perubahan sosial budaya yang terjadi menimbulkan adanya reinterpretasi terhadap keyakinan keagamaan secara timbal balik (Abdullah 1994).

Penggunaan keyakinan keagamaan untuk kepentingan politik dan wilayah dakwah seperti jihad, *istighosah*, institusi *bahtsul masail* untuk menentukan sikap politik, perang ayat suci al Quran dan hadist sebagai media legitimasi, *bughot* (makar), safari sholat jumat, pemberian sumbangan sarana keagamaan, pemberian jimat, *jeze* (kekebalan), asma' (doa), kekuatan magis religius, simbol surban, dan sarung dan pidato dengan lafal ayat-ayat suci. Firth menyatakan bahwa keyakinan keagamaan digunakan oleh berbagai organisasi keagamaan di berbagai negara untuk memperjuangkan keyakinan politik mereka, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Indonesia, Malaysia, Iran, Pakistan, Jepang termasuk masyarakat Tikopia di Kepulauan Solomon (Firth 1980: 584-585). Balandier (1984: 1-23) menyatakan bahwa agama bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan, jaminan kesahannya atau sarana yang efektif dalam perjuangan politik.

Temuan penelitian Middleton menguatkan tentang kaitan antara struktur upacara dan struktur wewenang pada suku Lugbara di Uganda. Fortes menegaskan kenyataan yang hampir sama di kalangan orang Tallensi di Ghana bahwa kebaktian leluhur merepresentasikan sistem



hubungan-hubungan sosial dan sistem yuridis-politik. Kajian itu menyatakan jalinan kekuasaan politik dan agama (Ballandier 1984: 18-20). Jauh sebelum itu, Weber menyatakan adanya pengaruh keyakinan keagamaan Protestan dengan tumbuh dan berkembangnya kapitalisme (Weber 2000). Temuan penelitian Meyer di Ghana menunjukkan adanya penggunaan keyakinan keagamaan oleh pemuka agama Kristen Pantekosta sebagai komoditi (Meyer 2002: 247-269). Penelitian Cassanelli di Somalia menyatakan adanya komoditi pohon Qat (*catha edulis*) yang diyakini mempunyai kekuatan magi. Perdagangan komoditi itu menunjukkan adanya jaringan perdagangan komoditi yang melibatkan penjual, pembeli, distributor, dan intervensi negara (Cassanelli 1986: 236-260). Penelitian Cohen pada Suku Hausa di Kota Ibadan, Nigeria menunjukkan penggunaan keyakinan keagamaan Tarekat Tijaniya untuk meningkatkan solidaritas kesukubangsaan. Tijaniya bercorak puritan dan menekankan upacara bersama, yang menghasilkan solidaritas persaudaraan Islam dalam komunitas Hausa. Solidaritas digunakan untuk menguasai perdagangan biji kola dan sapi yang mengalami kebangkrutan pasca kemerdekaan Nigeria (Cohen 1969).

Kekuasaan bukanlah semata-mata kekuasaan politik, melainkan kekuasaan dalam arti power seperti yang dimaksud Foucault (1984:427), yaitu kemampuan untuk menstruktur tindakan orang lain dalam bidang tertentu. Kekuasaan senantiasa beredar dari subyek yang satu ke yang lain.

Kyai di masyarakat merupakan kelas dominan karena pengetahuan keagamaan, kepemilikan, tafsir ajaran yang memposisikan kyai sebagai pewaris nabi dan selalu mengagungkan mereka, dinyatakan sebagai orang suci. Keberadaan mereka diperkuat dengan institusi pesantren, kitab-kitab yang dipakai dengan segala tafsir (kitab kuning), dan kemampuan memecahkan masalah spiritual, ritual-ritual keagamaan, serta penyembuhan. Kyai sebagai kaisar dalam kerajaan kecil dan penerus tradisi feodalisme Jawa. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama sebagai pesantren besar. Implikasinya adalah munculnya konstruksi tentang representasi kyai yang muncul sebagai tokoh nasional (Presiden) sebagai representasi dari NU.

Konteks Penelitian: Tapal Kuda

Istilah tapal kuda merujuk pada wilayah di Propins Jawa Timur dengan ciri-ciri dominan, yaitu Islam, NU, pesantren, Madura dan Kyai. Ciri-ciri tersebut tersebar di wilayah Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Sebaran wilayah itu menyerupai ladam (tapal kuda).



Kabupaten Pasuruan, secara astronomis terletak pada posisi $112^{\circ} 30' - 113^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 30' - 8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan 1.474,01 km², yang terbagi menjadi 24 kecamatan dan 341 desa, 24 kelurahan, 1560 dusun, 89 lingkungan dan 8197 rukun tetangga (BPS Pasuruan 2002: 1-14). Secara administratif, Kabupaten Pasuruan berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura, sebelah timur dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan dengan Kabupaten Malang, dan sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto.

Secara geomorfologis, Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi tiga lingkungan, yaitu daerah pegunungan dan berbukit, daerah dataran rendah, dan daerah pantai. Daerah pegunungan dengan ketinggian antara 180-3000 meter dpal. Daerah ini membentang di bagian selatan dan barat, meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tukur, Purwodadi, Prigen dan Gempol. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6-91 meter dpal, berada di bagian tengah, merupakan daerah yang subur, meliputi Kecamatan Kejayan, Gondangwetan, Winongan, dan Grati. Daerah pantai dengan ketinggian antara 2-8 meter dpal, daerah ini membentang di bagian utara meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.

Kondisi geomorfologis itu berhubungan dengan pemukiman penduduk. Daerah daerah pegunungan dan berbukit terdapat pemukiman Tengger (*wong Tengger*), daerah dataran rendah dihuni oleh orang Jawa, Madura dan suku bangsa lainnya (Cina, Arab, Sumbawa, Bugis, Mandar, Eropa), sedangkan daerah pantai sebagian besar dihuni oleh pemukiman penduduk berasal dari Madura. Daerah dataran rendah merupakan pusat kekuasaan sedangkan daerah pantai dan gunung merupakan wilayah pinggiran. Orang yang bertempat tinggal di daerah pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial dinyatakan sebagai orang kota (*oreng kottha*, *wong kuto*) sedangkan masyarakat pinggiran disebut orang desa (*oreng disa*, *wong deso*). Orang bukit (*wong Tengger*) menyatakan orang di dataran rendah dengan sebutan *wong ngare*. *Wong ngare* sebagai masyarakat yang mempunyai jati diri ingin menguasai, penuh tipu muslihat, dan mempunyai kekuatan penaklukan yang sangat besar. Di sisi lain, kondisi wilayah itu berhubungan dengan kecenderungan pilihan mata pencaharian.

Pasuruan secara etimologis berasal dari *suruh*. Zoetmulder menjelaskan tentang arti kata *suruh* mempunyai dua pengertian, yaitu tugas atau pekerjaan yang diperintahkan, orang yang diberi tugas, atau juga orang yang bekerja di bawah pimpinan orang lain dan daun sirih, *tadah*



suruh artinya tempat sirih. Pengertian pertama berasal dari kata *suruh*, *suruhan* sedangkan yang kedua berasal *suruh*, *sereh* (Zoetmulder 1995, II: 1158). Bukti arkeologis, filologis, dan historis menunjukkan nama Pasuruan relatif lebih sesuai dengan pengertian pertama. Pasuruan sejak masa prasejarah sampai saat ini merupakan wilayah penyebaran kebudayaan yang penting.

Penduduk Kabupaten Pasuruan mempunyai karakteristik heterogen. Sensus Penduduk Tahun 2000 menjelaskan tentang latar belakang keagamaan penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.366.605 jiwa terdiri dari Islam (1.339.837 jiwa), Katolik (4518 jiwa), Protestan (5436 jiwa), Hindu (15832 jiwa), Budha (674 jiwa), dan lainnya (308 jiwa) (Hasil Sensus 2000 Penduduk Jawa Timur.2002:39). Sementara itu sensus Penduduk Tahun 2000 menjelaskan tentang latar belakang etnis penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.366.277 jiwa terdiri dari Jawa (1.269.069 jiwa), Madura (54.611 jiwa), Using (35 jiwa), Cina (961 jiwa), Bawean atau *Bebian* (177 jiwa), Sunda Priangan (1052), Tengger (14.695 jiwa), Arab (2.237 jiwa), lainnya (23.440 jiwa) (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, Penduduk Jawa Timur: 75)⁴. Kedua data, yaitu jumlah penduduk dengan latar belakang keagamaan (1366.605 jiwa) dan etnis penduduk (1366.277 jiwa) di Kabupaten Pasuruan ternyata tidak sama terdapat selisih 328 jiwa. Menurut saya, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang lebih valid adalah 1.366.605 (BPS Kabupaten Pasuruan 15 Mei 2003).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yaitu 871.683 jiwa (Sensus Penduduk 1971), 998.598 jiwa (Sensus Penduduk 1980), 1.181.206 (Sensus Penduduk 1990), 1.366.605 jiwa (Sensus Penduduk 2000). Prosentase laju pertambahan penduduk dari tahun 1971-1980 sebesar 1,89% dari tahun 1980-1990 sebesar 1,69% sedangkan dari tahun 1990-2000 sebesar 1,59%.

Pendidikan di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh pesantren, madrasah, dan sekolah. Pesantren dan madrasah diidentikan dengan ilmu agama dan bekal akhirat sedangkan sekolah hanya untuk kepentingan di dunia. Jumlah pesantren pada tahun pelajaran 2002/2003 di Kabupaten Pasuruan adalah 172 buah yang tersebar di 24 kecamatan. Jumlah santri di pesantren, yaitu 32.299 orang terdiri dari laki-laki 14930 dan perempuan. Jumlah ustad 2.390

⁴ Jumlah penduduk yang disajikan dalam Pasuruan dalam Angka yang disusun oleh BPS dan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan tidak bisa digunakan karena penghitungan jumlah penduduk hanya didasarkan pada estimasi sehingga tidak valid. Hasil sensus lebih valid karena dilakukan dengan pencacahan langsung bukan estimasi



orang terdiri dari laki-laki (1432 orang) dan perempuan 958 orang) (Laporan Rekapitulasi Data Pondok Pesantren Tahun 2002/2003).

Pesantren induk yang berpengaruh di Pasuruan adalah Pesantren Sidogiri, dan Pesantren Besuk. Jaringan intelektual pesantren induk dan pesantren yang didirikan oleh santrinya berlaku sepanjang hayat. Jaringan itu dimantapkan dengan ajaran tarekat. Tradisi itu dibakukan secara berkelanjutan oleh santri pesantren yang berhasil menamatkan pendidikannya dan mendirikan pesantren pula. Jaringan pesantren dibakukan pula melalui ikatan perkawinan (Dhofier 1982). Jaringan antara pesantren induk dan pesantren yang didirikan oleh santrinya yang sepanjang hayat itu seperti *multi level marketing*. Semakin banyak pesantren yang didirikan oleh santrinya dan diklasifikasikan menjadi kyai khos maka pesantren induk semakin *karomah* dan kharismatis. Jaringan itu dikuatkan secara simbolis dengan melakukan *tawasul* (perantara) dalam berdoa dan mengajarkan kitab kuning. Artinya, pengakuan terhadap mata rantai intelektual yang mereka peroleh dari gurunya secara jelas dan berkelanjutan sampai kepada mereka (*sanad*).

Pesantren dianalisis dari pengelolaan sistem pengajaran bisa diklasifikasikan menjadi empat model, yaitu diniyah, perpaduan diniyah dan Depag, perpaduan diniyah dengan Depdiknas, dan perpaduan antara diniyah, Depag dan Depdiknas. Pesantren yang melaksanakan model diniyah terdiri dari jenjang *awaliyah*, *wustho*, dan *ulya*. Pesantren model ini dinyatakan sebagai pesantren salaf. Pesantren yang melaksanakan model Depag terdiri dari madrasah ibtidaiyah (SD), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (SMU) sedangkan model Depdiknas adalah sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan. Kedua model itu dinyatakan sebagai pesantren modern (*khalafy*). Model pertama adalah diniyah pada pagi hari sedangkan sore dilakukan pendidikan Depag. Pesantren di Pasuruan semuanya menerapkan model pertama, yaitu diniyah (173 buah). Model ini sistem evaluasinya didasarkan pada kemampuan membaca dan memahami kitab kuning (*kitab gundul*), dan bahasa arab. Pengakuan terhadap kemampuan mereka bervariasi, yaitu ada yang diberi ijazah dan sekedar restu dari kyai. Logikanya, santri mencari ilmu bukan mencari ijazah. Pesantren model kedua terdapat pada 56 pesantren. Pesantren model ketiga, yaitu diniyah dengan Depdiknas hanya di empat pesantren dari 172 buah. Pesantren model keempat terdapat pada dua pesantren, yaitu Ngalah di Kecamatan Purwosari dan pesantren Bahrul Ulum di Kecamatan Prigen. Konstruksi masyarakat yang cenderung mengirim anaknya ke pesantren berimplikasi pada adanya



perbedaan perlakuan antara kitab dan buku. Perbedaan itu berhubungan dengan penghormatan kepada benda itu, yaitu kitab sebagai yang sakral sehingga cara membawanya dengan cara didekap di dada, dibawa dengan tangan kanan atau diletakkan di atas kepala sedangkan buku dianggap biasa dengan perlakuan biasa.

Sistem kekerabatan masyarakat Madura, Jawa, dan Tengger mengacu pada ikatan keturunan dari garis ayah dan garis ibu (*paternal and maternal relatives*). Stratifikasi masyarakat adalah orang kebanyakan, pegawai pemerintah (*ponggebe, arje, parjeji*), agama (kyai) dan pejabat. Golongan agama terdiri dari kyai dan keluarganya (*kyae, yai, lora, gus, ning, nyi*) sedangkan santri (*santri*) berada di lapisan bawahnya. *Binderah* adalah orang yang telah dinyatakan selesai menempuh pendidikan dalam tradisi pesantren. Rumah kyai dan keluarganya oleh masyarakat disebut *dalem*. Perkawinan antara binderah atau santri dengan keluarga kyai tetap berada di bawah keluarga yang melakukan antarkeluarga kyai. Masyarakat membedakan kekerabatan dalam tradisi pesantren ke dalam tiga bentuk pernyataan, yaitu orang dalam, orang *mambu-mambu*, dan orang luar. Orang dalam merupakan keluarga kyai yang disebabkan perkawinan antarkeluarga kyai. Orang *mambu-mambu* adalah keluarga kyai yang melakukan perkawinan dengan keluarga bukan kyai termasuk dengan santri. Orang luar adalah masyarakat yang menjadi santri kyai atau kebanyakan. Kenyataan ini nampak dalam penghormatan masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat⁵. Pertimbangan *nasab* menjadi penentu suksesi pesantren. Lapisan tertinggi dalam birokrasi adalah pejabat pemerintah. Perlakuan terhadap pejabat pemerintah selain dikondisikan oleh aturan protokoler juga perlakuan kultural seperti pilihan bahasa, bersikap dan acuan bertingkah laku. Bahasa yang digunakan selalu mengacu pada posisi lawan bicara dan kondisi yang dihadapi. Konstruksi itu dinyatakan dalam bentuk tindak tutur seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

5 K.H. Munif Abdul Karim, pengasuh Pesantren Darul Karomah, Kramat Pasuruan meninggal pada tanggal 25 Agustus 2003 karena sakit. Wasiat almarhum adalah jenazahnya dimakamkan di lingkungan pesantren dengan tujuan semata-mata ingin dekat dengan santri-santrinya. Pada saat akan dimakamkan ribuan pelayat rela berdesak-desakan agar bisa memegang keranda almarhum. Padahal, pihak keluarga sudah memberikan pagar pembatas berupa bambu mengitari ribuan pelayat tersebut. Mereka percaya sebagai ngalap berkah bila berhasil memegang keranda tersebut. Kejadian yang lebih karomah adalah pada waktu pemakaman KH. Hamid dan KH. Hasani. KH. Hamid dimakamkan di belakang mesjid Jamik Pasuruan yang dihadiri ratusan ribu pelayat. KH. Hamid dipercaya oleh masyarakat sebagai Waliyullah (Ahmad 2003). KH. Hasani, pengasuh Pesantren Sidogiri yang meninggal 5 Juni 2001 yang dimakamkan di lingkungan pesantren. Saat pemakaman dihadiri ratusan ribu pelayat yang masing-masing berusaha menyentuh keranda. Bahkan, pihak keluarga menyatakan melalui pengeras suara 'Hormati mayyit, hormati jenazah, jangan berebutan'. Keadaan serupa terjadi pada saat pemakaman KH. Abdulloh Hunain (73 tahun), pengasuh Pesantren Riyadlotut Tullab, Pasinan, Lekok, 19 Agustus 2004 yang berjarak 50 meter menghabiskan waktu setengah jam karena banyaknya warga yang ingin mengusung keranda.



Data yang lain adalah keberadaan partai politik yang mengusung keyakinan keagamaan Islam di Kabupaten Pasuruan berhasil memenangkan perolehan suara pada pemilihan umum sejak tahun 1955 sampai dengan pemilu legislatif dan presiden, wakil presiden 2004. Pemilu 1987 sebagai perkecualian Golkar sebagai partai hegemonik muncul sebagai pemenang. Pada pemilu 1955, Partai NU memperoleh suara mayoritas (222.885 orang), selanjutnya secara berurutan adalah PNI (80.148 orang), Masyumi (16.403 orang), dan PKI (27.520 orang). Pemilu tahun 1971, menunjukkan perolehan suara DPR RI sebagai berikut: NU (250.550 orang), Parmusi (4.378 orang), Golkar (161.901 orang), PNI (30.742 orang), sedangkan total penduduk adalah 846.464 jiwa (Ward 1974: 163). Pemilu 1977 sampai dengan 1998 masa orde baru selalu dimenangkan PPP, kecuali pemilu tahun 1987.

Pada pemilu 1999, perolehan suara dan kursi untuk DPRD Kabupaten Pasuruan secara berurutan adalah Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara terbanyak, yaitu 415.184 meraih 22 kursi, PDIP sejumlah 159.698 suara memperoleh 8 kursi, Partai Golkar sebanyak 93.303 suara meraih 5 kursi, PPP sebanyak 25.200 meraih 2 kursi, PAN sejumlah 19.087 meraih 1 kursi, Partai Nahdhatul Ummat (PNU) sejumlah 8.027 meraih 1 kursi dan PBB sebanyak 7644 meraih 1 suara. Surat suara yang sah sebanyak 772.953, tidak sah 30.919, suat suara tidak terpakai sebanyak 68.413, surat suara rusak sebanyak 4.532, surat suara tambahan sejumlah 4.991, jumlah suara sebanyak 803.872 sehingga surat suara yang diterima sejumlah 881.808 (SK. Panitia PPD II Kabupaten Pasuruan No.: 85/13.14.3/VI/1999, tanggal 14 Juni 1999).

Di Pasuruan terdapat tiga organisasi keagamaan yang menentukan keyakinan keagamaan penduduk Pasuruan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (MD), dan Persatuan Islam Bangil. Kehadiran konstruksi ketiga organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat bervariasi. Al Irsyad tidak populer pada masyarakat perdesaan dan sangat sedikit pada masyarakat perkotaan di Pasuruan. Di sisi lain, masyarakat Tengger mempunyai keyakinan keagamaan tersendiri. Pada orang Tengger dikenal Tengger Islam dan agama Tengger. Masyarakat Tengger relatif lebih menerima keberadaan keyakinan keagamaan mereka, yaitu NU. Mereka mempunyai keyakinan keagamaan tersendiri yang disebut agama Tengger. Hanya, pada masa orde baru diseragamkan dengan Hindhu Bali dan masuk dalam organisasi Prasadha Hindhu. Agama Tengger berbeda dengan Hindhu Bali. Sebagai bukti adalah upacara



unan-unan, karo, kasadha, entas-entas dan penguburan mayat. Orang Islam Tengger melakukan semua ritual itu dengan berdoa kepada Allah SWT⁶.

Pendidikan di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh pesantren dan madrasah. Pesantren dan madrasah diidentikan dengan ilmu agama dan bekal akhirat sedangkan sekolah hanya untuk kepentingan di dunia. Jumlah pesantren pada tahun pelajaran 2002/2003 di Kabupaten Pasuruan adalah 172 buah yang tersebar di 24 kecamatan. Jumlah santri di pesantren, yaitu 32.299 orang terdiri dari laki-laki 14930 dan perempuan. Jumlah ustad 2.390 orang terdiri dari laki-laki (1432 orang) dan perempuan 958 orang) (Laporan Rekapitulasi Data Pondok Pesantren Tahun 2002/2003).

Pesantren induk yang berpengaruh di Pasuruan adalah Pesantren Sidogiri. Berdirinya pesantren Sidogiri terdapat dua versi. Versi Pantia hari Jadi Kabupaten Pasuruan adalah didirikan oleh Sayid Sulaiman pada tanggal 20 September 1712. Versi Pesantren Sidogiri didirikan pada tanggal 5 Oktober 1745. Salah seorang keturunannya menjadi *mustasyar* NU waktu pertama kali didirikan tahun 1926, yaitu KH. Mas Nawawi. Pesantren ini mempunyai beberapa santri setelah menamatkan pendidikannya berhasil mendirikan pesantren, di antaranya KH. Kholil Bangkalan Madura. Jaringan intelektual pesantren induk dan pesantren yang didirikan oleh santrinya berlaku sepanjang hayat. Jaringan itu dimantapkan dengan ajaran tarekat. Tradisi itu dibakukan secara berkelanjutan oleh santri pesantren yang berhasil menamatkan pendidikannya dan mendirikan pesantren pula. Jaringan pesantren dibakukan pula melalui ikatan perkawinan (Dhofier 1982). Jaringan antara pesantren induk dan pesantren yang didirikan oleh santrinya yang sepanjang hayat itu seperti *multi level marketing*. Semakin banyak pesantren yang didirikan oleh santrinya dan diklasifikasikan menjadi kyai khos maka pesantren induk semakin *karomah* dan kharismatis. Jaringan itu dikuatkan secara simbolis dengan melakukan *tawasul* (perantara) dalam berdoa dan

⁶ Pengakuan Sudiono, orang Tengger, pedagang, khotib, Ketua Pengurus Anak cabang PKB Tosari, adalah 'nenek moyang saya Jaka Seger, Roro Anteng, Aji Saka sama dengan orang Tengger yang lain. Saya memeluk Islam sehingga tradisi Tengger saya tetap Bahkan, model dakwah itu, saya berhasil memasukkan orang Tengger menjadi orang Islam, yang penting kan syahadatnya. Kasadha, saya ke Gunung Bromo bersama-sama dengan orang Tengger Islam terus tahlilan, membaca sholawat, dan diakhiri dengan berdoa kepada Allah SWT selanjutnya makan bersama dengan orang Tenger lainnya. Pak Suja'i (Dukun Tengger) ketika berdiskusi di Hotel Antariksa Malang, tanggal 3 Januari 2003- beliau meninggal pada bulan Juni 2003 menyatakan kenyataan seperti itu biasa dan orang Tengger lainnya bisa menerima. Kan sama-sama orang Tengger. Tidak ada politisasi agama dan tidak ada dakwah Islam untuk menarik orang Tengger. Tidak boleh berdakwah pada orang yang telah beragama. Kalau toh berpindah itu sebagai bentuk pernyataan sukarela, setelah yang bersangkutan menentukan sendiri. Pada saat itu keputusan diambil oleh yang bersangkutan bukan karena dakwah. Menantu saya orang Madura dan mau menerima agama anak saya, kan selesai. Yang tidak boleh adalah pemaksaan orang yang telah beragama untuk pindah ke agama orang yang memaksa. Informan yang lain, Sisbar Nursya, wong Tengger menyatakan lafal *basmallah* diucapkan oleh wong Tengger Islam dengan ' *himrahmir man rohi lahmilbis*'



mengajarkan kitab kuning. Artinya, pengakuan terhadap mata rantai intelektual yang mereka peroleh dari gurunya secara jelas dan berkelanjutan sampai kepada mereka (*sanad*).

Pesantren dianalisis dari pengelolaan sistem pengajaran bisa diklasifikasikan menjadi empat model, yaitu diniyah, perpaduan diniyah dan Depag, perpaduan diniyah dengan Depdiknas, dan perpaduan antara diniyah, Depag dan Depdiknas. Pesantren yang melaksanakan model diniyah terdiri dari jenjang *awaliyah*, *wustho*, dan *ulya*. Pesantren model ini dinyatakan sebagai pesantren salaf. Pesantren yang melaksanakan model Depag terdiri dari madrasah ibtidaiyah (SD), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (SMU) sedangkan model Depdiknas adalah sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan. Kedua model itu dinyatakan sebagai pesantren modern (*khalafy*). Model pertama adalah diniyah pada pagi hari sedangkan sore dilakukan pendidikan Depag. Pesantren di Pasuruan semuanya menerapkan model pertama, yaitu diniyah (173 buah). Model ini sistem evaluasinya didasarkan pada kemampuan membaca dan memahami kitab kuning (*kitab gundul*), dan bahasa arab. Pengakuan terhadap kemampuan mereka bervariasi, yaitu ada yang diberi ijazah dan sekedar restu dari kyai. Logikanya, santri mencari ilmu bukan mencari ijazah. Pesantren model kedua terdapat pada 56 pesantren. Pesantren model ketiga, yaitu diniyah dengan Depdiknas hanya di empat pesantren dari 172 buah. Pesantren model keempat terdapat pada dua pesantren, yaitu Ngalah di Kecamatan Purwosari dan pesantren Bahrul Ulum di Kecamatan Prigen. Konstruksi masyarakat yang cenderung mengiirm anaknya ke pesantren berimplikasi pada adanya perbedaan perlakuan antara kitab dan buku. Perbedaan itu berhubungan dengan penghormatan kepada benda itu, yaitu kitab sebagai yang sakral sehingga cara membawanya dengan cara didekap di dada, dibawa dengan tangan kanan atau diletakkan di atas kepala sedangkan buku dianggap biasa dengan perlakuan biasa. Bahkan, untuk memulai mengaji kitab sang guru mengirimkan *al fatihah* bagi penulis kitab itu dengan harapan mendapatkan barokah dan restu simbolik dari penulisnya..

Keadaan murid madrasah di Kabupaten Pasuruan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3: Murid Madrasah Kabupaten Pasuruan tahun 2002

Jenis Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Diniyah	8.447	8.979	17.426
Ibtidaiyah	44.172	46.689	90.861
Tsanawiyah	16.294	15.191	31.485



Aliyah	2.264	2.756	5.020
Pesantren	14.930	17.369	32.299
Jumlah	86.107	90.984	177.091

Sumber: Kantor Depag Kabupaten Pasuruan Tahun 2002

Tabel 3 menunjukkan bahwa di lingkungan madrasah dan pesantren jumlah santri perempuan lebih banyak dari jumlah santri laki-laki. Kenyataan itu berhubungan dengan motivasi mereka masuk pesantren. Bagi seorang perempuan menjadi santri merupakan pilihan yang rasional untuk meningkatkan komoditi sosial. Komoditi sosial itu berhubungan dengan pilihan pendamping hidup laki-laki di Pasuruan. Pendamping hidup yang berasal dari perempuan santri diyakini mampu menciptakan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertimbangan itu terjadi karena di pesantren telah diajarkan materi tentang al qur'an, bahasa Arab, dan menjadi istri yang baik. Penguasaan materi relatif tidak menjadi pertimbangan utama yang penting bisa mengaji alqur'an.

Jumlah sekolah, Murid, dan guru dibawah Depag Tahun 2002 dijabarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4: Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Dibawah Depag Tahun 2002

No	Kondisi	MI	MIS	MTs N	MTs S	MAN	MAS
1.	Sekolah	2	584	5	87	1	34
2	Murid	607	93.004	2699	13350	590	4430
3	Guru	26	5499	166	1450	42	575

Sumber: Kantor Depag Kabupaten Pasuruan Tahun 2002

Keterangan: Jumlah guru agama negeri di SD/MI (649 orang), SMP/MTS (43 orang) dan SMTA/MAS (14 orang).

Tabel 4 menunjukkan bahwa rasio sekolah, murid dan guru relatif memadai, kecuali MTs S. MI dengan rasio murid dan guru adalah 1 orang guru mengajar 23 siswa dan masing-masing sekolah siswanya adalah 304. MIS dengan rasio setiap sekolah mempunyai siswa 159 orang dan setiap guru mengajar 17 siswa. MTs N dengan rasio setiap sekolah mempunyai siswa sebanyak 540 siswa dan setiap guru mengajar 16 siswa. MTs S dengan rasio setiap sekolah mempunyai 153 siswa dan setiap guru mengajar 92 siswa. MTs S berarti kekurangan tenaga guru dan sementara ini dialukan dengan tenaga sukarela (sukwan) atau honorer. MAN dengan rasio setiap guru mengajar 14 siswa. MAS dengan rasio setiap sekolah mempunyai 130 siswa dan setiap guru mengajar 8 siswa.



Konsisi madrasah dibandingkan dengan sekolah dibawah Depdiknas terdapat perbedaan. Jumlah sekolah, kelas, guru, dan murid dibawah Depdiknas Tahun 2002 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 : Jumlah sekolah, Kelas, Guru, dan Murid Dibawah Depdiknas Tahun 2002

No	Kondisi	SDN	SDS	SLTPN	SLTPS	SMUN	SMUS	SMKN/SMKS
1.	Sekolah	736	23	40	46	6	23	16
2	Kelas	4535	170	481	225	120	143	175
3	Murid	130575	5269	19.592	7900	4972	5612	9962
4	Guru	5.108	265	1204	901	311	504	505

Sumber: Kantor Dinas dan K Kabupaten Pasuruan Tahun 2002

Tabel 5 menyatakan bahwa rasio sekolah, kelas, murid dan guru memadai. SDN dengan rasio setiap sekolah mempunyai 6 kelas, setiap kelas terdapat 29 siswa, dan setiap guru mengajar rata-rata 26 siswa. SDS dengan rasio setiap sekolah mempunyai 7 kelas, setiap kelas terdapat 30 siswa, dan setiap guru mengajar 19 siswa. SLTPN dengan rasio setiap sekolah terdapat 12 kelas, setiap kelas terdapat 41 siswa dan setiap guru mengajar 16 siswa. SLTPS dengan rasio setiap sekolah terdapat 5 kelas, setiap kelas terdapat 35 siswa dan setiap guru mengajar 9 siswa. SMUN dengan rasio setiap sekolah terdapat 20 kelas, setiap kelas terdapat 41 siswa dan setiap guru mengajar 16 siswa, sedangkan SMUS dengan rasio setiap sekolah terdapat 6 kelas, setiap kelas terdapat 39 siswa dan setiap guru mengajar 11 siswa. SMKN/SMKS dengan rasio setiap sekolah terdapat 11 kelas, setiap kelas terdapat 57 siswa dan setiap guru mengajar 20 siswa.

Sistem kekerabatan masyarakat Madura, Jawa, dan Tengger mengacu pada ikatan keturunan dari garis ayah dan garis ibu (*paternal and maternal relatives*). Stratifikasi sosial masyarakat Madura di Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu orang kecil (*oreng kenek*), golongan pegawai (*oreng ponggabe*), dan golongan priyayi, bangsawan (*parjaji, arje*). Jika dilihat berdasarkan agama hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu santri (*santri, bindere, lora*) dan bukan santri (*banne santri*). Saat ini stratifikasi masyarakat adalah orang kebanyakan, pegawai pemerintah (*ponggabe, arje, parjeji*), agama (kyai) dan pejabat. Orang kecil (*oreng kenek*) menempati lapisan sosial paling bawah berdasarkan harta kepemilikan, keturunan dan pendidikan. Orang kecil terdiri dari nelayan, petani, pengrajin dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Lapisan sosial berikutnya diisi oleh golongan pegawai pemerintah dengan mendapatkan penghasilan tetap, termasuk militer dan kepolisian.



Golongan agama terdiri dari kyai dan keluarganya (*kyae, yai, lora, gus, ning, nyi*) sedangkan santri (*santri*) berada di lapisan bawahnya. *Binderah* adalah orang yang telah dinyatakan selesai menempuh pendidikan dalam tradisi pesantren. Rumah kyai dan keluarganya oleh masyarakat disebut *dalem*. Perkawinan antara binderah atau santri dengan keluarga kyai tetap berada di bawah keluarga yang melakukan antarkeluarga kyai. Masyarakat membedakan kekerabatan dalam tradisi pesantren ke dalam tiga bentuk pernyataan, yaitu orang dalam, orang *mambu-mambu*, dan orang luar. Orang dalam merupakan keluarga kyai yang disebabkan perkawinan antarkeluarga kyai. Orang *mambu-mambu* adalah keluarga kyai yang melakukan perkawinan dengan keluarga bukan kyai termasuk dengan santri. Orang luar adalah masyarakat yang menjadi santri kyai atau kebanyakan. Kenyataan ini nampak dalam penghormatan masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat⁷. Pertimbangan *nasab* menjadi penentu suksesi pesantren. Lapisan tertinggi dalam birokrasi adalah pejabat pemerintah. Perlakuan terhadap pejabat pemerintah selain dikondisikan oleh aturan protokoler juga perlakuan kultural seperti pilihan bahasa, bersikap dan acuan bertingkah laku.

Bahasa yang digunakan selalu mengacu pada posisi lawan bicara dan kondisi yang dihadapi (*speech level and speech act*). Orang Jawa mengenal tingkatan bahasa, yaitu *ngoko, madya, dan krama*. Orang Madura mengenal tingkatan bahasa (*ondegge besa*), yaitu bahasa keraton, bahasa tinggi (*besa tenggi*), bahasa halus (*besa alos*), bahasa menengah (*besa tengnga'an*), dan bahasa kasar (*mapas*). Bahasa keraton digunakan oleh para keturunan bangsawan dan para pegawai pemerintah berkomunikasi kepada pejabat pemerintah tertinggi dan santri, *bindereh* kepada kyai, seperti penggunaan *abdi dalem* (saya) dan *junan dalem* (kamu). Bahasa tinggi digunakan oleh pegawai dan *binderah*, kyai yang sederajat, misalnya dengan *abdina* (saya) dan *panjennengnan* (kamu). Bahasa halus digunakan seseorang dengan lawan bicara sederajat dan telah menengah relatif lama, misalnya dengan *kaula* (saya) dan *sampeyan* (kamu). Bahasa menengah digunakan oleh seorang mertua kepada menantunya dengan *bule* (saya) dan

⁷ K.H. Munif Abdul Karim, pengasuh Pesantren Darul Karomah, Kramat Pasuruan meninggal pada tanggal 25 Agustus 2003 karena sakit. Wasiat almarhum adalah jenazahnya dimakamkan di lingkungan pesantren dengan tujuan semata-mata ingin dekat dengan santri-santrinya. Pada saat akan dimakamkan ribuan pelayat rela berdesak-desakan agar bisa memegang keranda almarhum. Padahal, pihak keluarga sudah memberikan pagar pembatas berupa bambu mengitari ribuan pelayat tersebut. Mereka percaya sebagai ngalap berkah bila berhasil memegang keranda tersebut. Kejadian yang lebih *karomah* adalah pada waktu pemakaman KH. Hamid dan KH. Hasani. KH. Hamid dimakamkan di belakang mesjid Jamik Pasuruan yang dihadiri ratusan ribu pelayat. KH. Hamid dipercaya oleh masyarakat sebagai Waliyullah (Ahmad 2003). KH. Hasani, pengasuh Pesantren Sidogiri yang meninggal 5 Juni 2001 yang dimakamkan di lingkungan pesantren. Saat pemakaman dihadiri ratusan ribu pelayat yang masing-masing berusaha menyentuh keranda. Bahkan, pihak keluarga menyatakan melalui pengeras suara 'Hormati mayyit, hormati jenazah, jangan berebutan'. Keadaan serupa terjadi pada saat pemakaman KH. Abdulloh Hunain (73 tahun), pengasuh Pesantren Riyadlotut Tullab, Pasinan, Lekok, 19 Agustus 2004 yang berjarak 50 meter menghabiskan waktu setengah jam karena banyaknya warga yang ingin mengusung keranda



dika (kamu). Bahasa kasar (*mapas*) digunakan oleh seseorang yang telah akrab dan sederajat dalam hal umur, kebiasaan, misalnya *sengko'* (saya) dan *be'na, kakeh, sede* (kamu). Bahasa menengah dan kasar sering muncul di kalangan masyarakat.

Penggunaan pilihan bahasa selalu diikuti dengan gerakan tubuh seperti ibu jari untuk menunjuk, posisi badan sedikit membungkuk, merapatkan kedua lengan kecuali sedang menunjuk sesuatu dalam berkomunikasi tidak menetap wajah lawan bicara dan intonasi suara menurun. Penggunaan pilihan bahasa sebaliknya akan dinyatakan *jenggel, cangkolang* (tidak mengerti sopan santun). Penggunaan pilihan bahasa itu dinyatakan ketika *sowan, nyabis*, bersilaturahmi ke kyai, pemuka agama, dan kepada orang yang lebih tua.

Wong Tengger menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Ngoko itu dinyatakan dalam *reang* (saya perempuan) atau *ison* (saya laki-laki) dan *rika* (kamu yang lebih tua) atau *sira* (kamu yang lebih muda).

Di Pasuruan terdapat tiga organisasi keagamaan yang menentukan keyakinan keagamaan penduduk Pasuruan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (MD), dan Persatuan Islam Bangil. Kehadiran konstruksi ketiga organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat bervariasi. Al Irsyad tidak populer pada masyarakat perdesaan dan sangat sedikit pada masyarakat perkotaan di Pasuruan. Masyarakat mempunyai konstruksi masyarakat masih menghormati keturunan Arab dari *nasab* (geneologi) Nabi Muhammad, SAW (habaib, sayyid, syarifah). Al Irsyad didirikan oleh Syekh Soorkati (Sudan) yang bukan merupakan keturunan nabi (*masyaikh*) bertujuan menghilangkan penghormatan kepada nabi dan kedudukan manusia pada dasarnya sama yang berbeda hanya iman dan takwa. Al Irsyad mempunyai kegiatan di bidang pendidikan di desa Syiar berupa mesjid, madrasah, dan asrama santri tetapi sejak tahun 2002 tidak ada kegiatan lagi bahkan bangunannya rusak. Mesjid relatif banyak jamaahnya hanya sholat Jumat sedangkan sholat lima waktu dilakukan oleh 2 atau 3 orang. Keyakinan keagamaan pengelola mesjid Al Irsyad ini adalah Muhammadiyah. Pengelola itu tidak berani membangun kembali karena hak wakaf ada pada Al Irsyad padahal warga kampung *Jlorong* (*deje lorong*-utara jalan) desa Syiar membutuhkan mesjid. Kondisi rusak di areal itu berlangsung sampai saat ini.



Di kalangan NU dikenal NU struktural dan NU kultural⁸. MD terdapat konstruksi MD Al Ikhlas,⁹-NU(MUNU), MD-Nas (Munas). Persatuan Islam (Persis) Bangil¹⁰ berdiri sendiri tidak mempunyai hubungan struktural dengan Persis Bandung walaupun diakui antarkeduaanya terdapat persamaan kesejarahan.

Di sisi lain, masyarakat Tengger mempunyai keyakinan keagamaan tersendiri. Pada orang Tengger dikenal Tengger Islam dan agama Tengger. Pada tahun 1912 di depan pasar desa Tosari dibangun sebuah mesjid oleh KH.Achmad Dahlan, Ki Hadjar Dewantara, dan HOS. Cokroaminoto. Mesjid itu sampai sekarang tetap dipertahankan dan dikenal dengan mesjid Achmad Dachlan. Kemudian, dengan alasan perbedaan keyakinan keagamaan antara MD dan NU maka penduduk setempat membangun mesjid dengan bantuan pemerintah mesjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Dakwah Islam di Kampung Ledoksari, desa Tosari. Islamisasi di kawasan pegunungan yang dihuni orang Tengger sudah berlangsung lama dan menimbulkan respon yang berbeda sampai pada terjadinya konflik. Hefner (1998) tidak melihat kenyataan itu sebagai salah satu pemicu konflik di pegunungan. Konflik yang terjadi di wilayah itu disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik.

Masyarakat Tengger relatif lebih menerima keberadaan keyakinan keagamaan mereka, yaitu NU. Mereka mempunyai keyakinan keagamaan tersendiri yang disebut agama Tengger. Hanya, pada masa orde baru diseragamkan dengan Hindhu Bali dan masuk dalam organisasi Prasadha Hindhu. Agama Tengger berbeda dengan Hindhu Bali. Sebagai bukti adalah upacara

⁸ NU struktural adalah para pengurus NU mulai dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus ranting, dan pengurus anak ranting. NU struktural terdiri dari syuraih dan tanfidiyah. NU kultural adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang menerapkan keyakinan keagamaan NU tetapi tidak berada dalam kepengurusan NU. NU diidentifikasi berteologi Al Asyari, mashab empat, menghormati ulama sebagai pewaris nabi, *tawasuth* (mengambil jalan tengah), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), *amar makruf nahi munkar* (berbuat baik dan menjauhi kemungkaran) serta mempertahankan *ahlu sunnah wal jamaah*

⁹ MD Al Ikhlas adalah MD yang melakukan purifikasi akidah dengan cara melawan takhyaul, bidah, dan khurafat. MD-NU adalah orang MD mempunyai keyakinan NU

¹⁰ Persis didirikan oleh KH.Zamzam dari Palembang di Bandung, tanggal 17 September 1926. Pada tahun 1940, A. Hassan pindah dari Bandung ke Bangil dengan membawa 25 siswanya dari 40. Persis Bandung dipimpin oleh KH.E. Abdurachman (Ferderspiel 1995; Noer 1988; Ensiklopedi Islam Indonesia 1996). .Siswanya diikat dengan syahadah dan sumpah setia' menjunjung tinggi agama Allah; tunduk dalam hati dan perkataan dalamaaml dan dalam akhlak, kepada perinath-perintah Allah dan Rasul-Nya, senantiasa memperdalam pengetahuan umum dan keislaman yang diwajibkan Islam atas setiap muslimin, senantiasa berusaha dengan tiada putus-putusnya memperbaiki dan mendidik diri sampai menjadi mukmin dalam arti kata penuh, wajib sholat, puasa dan bersedekah pada jalan Allah berupa harta, pikiran, dan berupa tenaga sekuatnya; wajib menurut contoh-contoh yang telah disnahkan rasul dan sahabat-sahabatnya; wajib menggap saudara yang tua sebagai bapa (ibu) atau kaka dari saudara yang muda sebagai anak atau adik dan yang sama sebagai saudara kandng sebagaimana ditentukan oleh Islam; wajib memakai pakaian yang diajarkan oleh Islam; haram mengahampiri hal-hal yang melanggar kesopanan Islam dalam pergaulan laki-laki dna perempuan; haram minum arak, berjudi, berdusta, berkhianat, melanggar kesopnan terhadap orang tua, dan wajib berhidmat kepada keduanya, serta wajib mensyiarkan Islam. Kewajiban sebagai santri harus tunduk pada peraturan pesantren yang disebut Qanun Pesantren



unan-unan, karo, kasadha, entas-entas dan penguburan mayat. Orang Islam Tengger melakukan semua ritual itu dengan berdoa kepada Allah SWT '*ijab kabul Islam, adate Tengger*'.

Tabel 6: Konstruksi Keyakinan Keagamaan Organisasi Keagamaan NU, Muhammadiyah dan Persis Bangil di Pasuruan

No.	Indikator	Nahdhatul Ulama	Muhammadiyah	Persis Bangil
1	Bedug	Ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pembacaan barzanji, diba'	Membaca	Tidak ada	Tidak ada
3	Pembacaan pem- bukaan dan akhir setiap kegiatan <i>Tarhem, bacaan sebelum sholat subuh</i>	Al Fatihah	Bismillah dan alhamdulillah	Alquran
4	Sholawat	Ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Lafal Salam	<i>Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad</i>	Tanpa <i>sayyidina</i>	Tanpa <i>sayyidina</i>
6	<i>Tawasul</i>	<i>Asaalamu'alaikum warohamtullahi ta'ala wa barokatuh</i>	Tanpa ta'ala	Tanpa ta'ala
7	Adzan	Nabi Muhammad, Syeh Abdul Qadir Jaelani	Tidak ada, langsung tanpa perantara	Tidak ada, langsung tanpa perantara
8	Adzan Sholat Jum'at	Sebelum memulai mem-baca Subhanallah dan sete-rusnya.	Tidak	Tidak
9	Niat Wudhu	Dua kali	Satu kali	Satu kali
10	Niat Puasa	Dilafalkan	Tidak	Tidak
11	<i>Qunut</i>	Dilafalkan	Tidak	Tidak
12	Jumlah rakaat sholat	Digunakan	Tidak	Tidak
13	<i>tarawih</i>	23 rakaat	Tidak	Tidak
14	Penentuan Ramadan		11 rokaat	11 rokaat
15	Penyerahan zakat	Ru'yah hiral (melihat bulan)		
16	Harta Zakat	Kyai	Hisab (menghitung)	Hisab(menghitung)
17	Sholat Ied	Beras	Amil	Amil
18	Adzan kubur	Mesjid	Beras,uang	Beras,uang
19	<i>Talqin</i>	Digunakan	Lapangan	Lapangan
20	Ritual kematian	Digunakan	Tidak	Tidak
21	Sholat Jum'at bagi perempuan	3,7,40,100,1000,khol	Tidak	Tidak
22	Sebutan Pemuka Agama	Tidak wajib	Tidak ada	Tidak ada
23	Ibadah Haji	<i>Kyai, Yayi, Romo Yai, Lora</i>	Boleh	Boleh
24	Tingkat Khotib sholat Jum'at	Adzan,ganti nama setelah pulang	Bapak	Bapak, Ustad
25	Sholawat antara dua khotbah	Digunakan	Tidak ada	Tidak ada
26	Sholawat antara dua khotbah	Dilafalkan	Tidak	Tidak
27	Dibacakan <i>Ansitu wasmau wa atiu rahima-kumulloh</i> Qiraah Qur'an	Digunakan	Tidak	Tidak
28	Pembacaan surah <i>A'la</i> Di akhir pemba-caan Surat <i>At Tin</i>	Setiap jeda me-lafalkan Allah	Menyimak	Menyimak
29	Pembacaan surah <i>A'la</i> Di akhir pemba-caan Surat <i>At Tin</i>	Diakhir mengu-capkan <i>Alaihis salam</i>	Tidak usah	Tidak usah
30	Pembacaan wirid	Mengucapkan <i>bala wa ana dalika minashahidin</i> Bersama-sama de-ngan suara keras	Tidak usah	Tidak usah
31	<i>Istighosah</i> Penetapan hukum fiqh dan fatwa	Dilakukan	Individual, suara	Individual, suara pelan
32		Bahtsul matsail dan penetapan fatwa	Individual, suara pelan	Tidak



33			Tidak Majlis tarjih	Kebebasan berpikir*
----	--	--	------------------------	---------------------

Keterangan:* Kebebasan berpikir dinyatakan secara simbolis oleh Pimpinan Persis Bangil dengan proses membuat roti bukan rotinya. Muhammadiyah memberikan roti (Keputusan Majlis tarjih) sedangkan Persis menekankan pada prosesnya. Pada Masa A. Hassan dinyatakan dengan *Tanya Jawab*, pada masa anaknya A.Qadir Hassan berusaha mengkritisi jawaban ayahnya dengan menulis *Kata Berjawab*, dan saat ini dikembangkan tulisan *Gayung Bersambut*.

Kekuatan politik lokal di Kabupaten Pasuruan yang menggunakan keyakinan keagamaan memperoleh dukungan yang menentukan untuk meraih kekuasaan. Pilihan kepala desa yang digelar di setiap desa selalu dimenangkan oleh calon kepala desa yang mendapatkan restu kyai pesantren yang dikategorikan sebagai pesantren induk di desanya. Sebagai contoh, pilihan kepala desa Pajaran, Kecamatan Rembang tahun 1999 dimenangkan oleh seorang



kepala Madrasah Miftahul Ulum (H. Mahdi) kelahiran tahun 1969. Pesaingnya adalah anak kepala desa sebelum digantikannya. Karena alasan administrasi terganjal oleh aturan persyaratan, yaitu minimal ijazah sekolah dasar atau yang sederajat. Ijazah madrasah diniyah yang telah dilegalisir Departemen Agama atau ijazah persamaan bisa digunakan.

Dengan sendirinya pesaingnya gugur dan kemudian disebarkan isu bahwa gugurnya calon disebabkan oleh manuver politik pemenang ke panitia pemilihan dan Camat Kecamatan Rembang. Calon kepala desa dalam pilkades hanya satu orang, yaitu H. Mahdi dan ‘bambung kosong’ (suara untuk menampung calon yang gugur) untuk melakukan pengembosan serta diadakan pilkades ulang. Masing-masing calon mendapatkan dukungan kyai. H. Mahdi mendapatkan dukungan kyai pesantren induk (Pesantren Miftahul Ulum), sedangkan bambung kosong didukung oleh K. Muzakky-kyai langgar (*kyae langgeren*) dan pejabat desa yang lama yang menurut masyarakat tergolong orang kuat, kyai langgar. Kyai pesantren (KH. Kholil) mendukung H.Mahdi dengan memberikan pernyataan ketika pengajian ‘Kalau ingin mendapatkan pemimpin yang amanah harus memilih orang, jangan memilih setan untuk melakukan pengembosan. Karena bambung kosong hanya cocok untuk setan’. Kyai Muzakky mendukung dengan pernyataan ‘pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang konsisten bukan menjegal lawan, untuk itu perlu diadakan pemilihan ulang dengan cara mencoblos bambung kosong.

Pada saat pemilihan H. Mahdi meraih kemenangan mutlak walaupun saat pelantikan harus dipapah karena tiba-tiba tidak berdaya seperti lumpuh. Semua pendukungnya berusaha untuk mencari pengobatan alternatif dan di atas atap serambi depan didapatkan sebungkah tanah kuburan, kain kafan, dan rambut. Kemudian, setelah dicarikan pengobatan alternatif sebulan kemudian sembuh. Langkah awal, H.Mahdi adalah silaturahmi ke KH.Muzakky pada saat kegiatan pengajian malam rabu dan ada rencana membangun mesjid. Rencana itu segera dibantu dengan mencarikan dana, safari jum’at bupati diarahkan ke sana dan memberikan bantuan pembangunan mesjid. Kenyataan itu menyebabkan K. Muzakky memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan dia. Ketika KH. Muzakky meninggal dunia di Mekkah saat beribadah haji yang mengurus segala kepentingan administrasi oleh keluarganya (ahli waris) diserahkan kepada H. Mahdi.

Partai politik yang mengusung keyakinan keagamaan Islam di Kabupaten Pasuruan berhasil memenangkan perolehan suara pada pemilihan umum sejak tahun 1955 sampai dengan



pemilu legislatif dan presiden, wakil presiden 2004. Pemilu 1987 sebagai perkecualian Golkar sebagai partai hegemonik muncul sebagai pemenang. Pada pemilu 1955, Partai NU memperoleh suara mayoritas (222.885 orang), selanjutnya secara berurutan adalah PNI (80.148 orang), Masyumi (16.403 orang), dan PKI (27.520 orang). Pemilu tahun 1971, menunjukkan perolehan suara DPR RI sebagai berikut: NU (250.550 orang), Parmusi (4.378 orang), Golkar (161.901 orang), PNI (30.742 orang), sedangkan total penduduk adalah 846.464 jiwa (Ward 1974: 163). Pemilu 1977 sampai dengan 1998 masa orde baru selalu dimenangkan PPP, kecuali pemilu tahun 1987. Data perolehan suara pada pemilu selama Orde Baru adalah

Tabel 7: Perolehan Suara Pemilu dan Kursi 1971-1997 DPRD Dati II Kabupaten Pasuruan

	Tahun	PPP	Golkar	PDI	Keterangan
1.	1971	256.445 ¹ (59,58%)	161.674 ² (37,56%)	12.760 ³ (2,86%)	ABRI 6 kursi, Antarwaktu 4
2.	1977	287.792 (57,11%)	202.770 (40,24%)	13.371 (2,65%)	
3.	1982	18 kursi 328.573 (58,89%)	15 kursi 209.311 (37,52%)	1 kursi 20.031 (3,59%)	ABRI 6 kursi, Antarwaktu 3
4.	1987	19 kursi 234.626 (40,15%)	14 kursi 310.321 (53,11%)	1 kursi 39.354 (6,74%)	ABRI 6 kursi, Antarwaktu 1
5.	1992	15 kursi 335.787 (49,88%)	19 kursi 265.268 (39,41%)	2 kursi 72.082 (10,71%)	ABRI 9 kursi. Total:45 kursi
6.	1997	18 kursi 404.586 (52,29%)	14 kursi 317.229 (37,65%)	4 kursi 17.137 (2,03%)	ABRI 9 kursi. Total:45
		20 kursi	15 kursi	1 kursi	ABRI 9 kursi

- Keterangan: 1. Jumlah perolehan suara setelah fusi. Secara rinci adalah NU (250.269 suara), Parmusi (4.501 suara), PSII (1.235 suara), Perti (440 suara). Perolehan kursi NU untuk DPRD Dati II Kabupaten Pasuruan sebanyak 19 buah. Fusi kelima partai ini adalah Partai Persatuan Pembangunan
2. Golkar memenuhi persyaratan sebagai partai politik tetapi tetap tidak mencantumkan sebagai Partai Golongan Karya. Perolehan kursinya sebanyak 14 buah. ABRI sebagai pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI memperoleh jatah sejumlah 6 kursi dan pengganti anggota antar waktu 4 buah.
3. Jumlah perolehan suara setelah fusi. Secara rinci adalah PNI (10.744 suara), IPKI (741 suara), Parkindo (503 suara), Partindo (178 suara) dan Murba (94 suara). PNI hanya memperoleh 1 (satu) kursi. Fusi keempat partai ini adalah Partai Demokrasi Indonesia. Sejak Tahun 1971, Ketua DPRD dipimpin oleh ABRI.

Sumber: Kantor Sosial Politik Kabupaten Pasuruan; Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan 2003. Sejak tahun 1999/2000 berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang)



Pada pemilu 1999, perolehan suara dan kursi untuk DPRD Kabupaten Pasuruan secara berurutan adalah Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara terbanyak, yaitu 415.184 meraih 22 kursi, PDIP sejumlah 159.698 suara memperoleh 8 kursi, Partai Golkar sebanyak 93.303 suara meraih 5 kursi, PPP sebanyak 25.200 meraih 2 kursi, PAN sejumlah 19.087 meraih 1 kursi, Partai Nahdhatul Ummat (PNU) sejumlah 8.027 meraih 1 kursi dan PBB sebanyak 7644 meraih 1 suara. Surat suara yang sah sebanyak 772.953, tidak sah 30.919, suat suara tidak terpakai sebanyak 68.413, surat suara rusak sebanyak 4.532, surat suara tambahan sejumlah 4.991, jumlah suara sebanyak 803.872 sehingga surat suara yang diterima sejumlah 881.808 (SK. Panitia PPD II Kabupaten Pasuruan No.: 85/13.14.3/VI/1999, tanggal 14 Juni 1999).

Pada tahun 1999, masyarakat Islam di desa Podokoyo mau mendirikan mesjid. Tetapi, masyarakat sekitar yang mayoritas agama Tengger menolaknya. Masyarakat Islam tetap bersikeras membangun pondasi mesjid dengan cara gotong royong (*sayan*). Situasi memanas dan terjadi kekerasan terhadap orang Islam. Kemudian, orang Islam menghubungi Gus Bakar, pengasuh Pesantren Metal Islam di Rejoso. Informasi itu segera ditindaklanjuti dengan melakukan perlindungan kepada orang Islam dan mendatangi kepala desa. Dengan strategi kekuatan massa dan kekerasan Kepala desa Podokoyo akhirnya menyetujui pembangunan mesjid itu sampai selesai ¹¹. Keberhasilan pembangunan mesjid di desa Podokoyo mengilhami masyarakat Islam di desa sekitarnya, seperti Desa Ngadiwono. Bahkan, di Sedaeng kepala desanya menghibahkan tanahnya untuk pembangunan mesjid. Pembangunan mesjid mengalami kendala hanya di desa Wonokitri yang mayoritas agama Hindu Tengger¹².

Pasuruan Kelabu ‘Maju Tak Gentar Membela Yang Benar’

Data dari media massa tulis (Kronologi Persitiwa Politik 1991-2000; Dokumentasi CSIS 2001) dan media massa radio terutama pada masa penggulingan pemerintahan Gus Dur. Transkrip wawancara radio El Shinta 5 April 2001 dengan Asyumardi Azra, 16 April 2001, wawancara dengan Emha Ainun Nadjib dan Sholahuddin Wahid, dan tanggal 17 April 2001 dengan Kordinator Front Pembela Kebenaran, Pasukan Berani Mati, Wiros Sugiman. Azra

¹¹ Wawancara dengan Gus Bakar setelah Pengajian Ahad Pagi di Rumah Panggung lingkungan Pesantren Metal Islam. Wawancara dilakukan Gus Bakar dalam perjalanan satu mobil menuju pengajian Maulid Nabi Muhammad, SAW di Grati sejauh 25 km. Perjalanan menuju ke lokasi dikawal rombongan kendaraan bermotor ‘konvoi’. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 April 2003.

¹² Wawancara dengan H.Sudiyono, *wong Tengger*, Ketua PAC PKB Kecamatan Tosari; Jayengpuspito, mantan kepala desa Sedaeng yang beragama Hindu Tengger, dan Shodiq, pensiunan Guru SD. Sudiyono mewakafkan tanahnya untuk pembangunan musholla di Sonogiri. Di kampung Ldoksari dibangun Mesjid Amal Bhakti Muslim Pancasila tahun 1997. Bahkan, sekarang di desa Tosari terdapat pesantren Salafiyah yang diasuh oleh Habib Taufiq



menjelaskan tentang konteks *bughot* secara historis dipraktekkan dalam sebuah negara *Daulah Islamiyah*, penguasanya sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi (*idhilullah fil ardh*) dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaan dan mempertahankan status quo. Dengan sendirinya konsep *bughot* menjadi tidak relevan dalam sejarah Islam di Indonesia. Emha Ainun Najib menyatakan harus ada pemisahan antara busur dengan anak panah. Artinya, NU harus menyatakan tidak meligitimasi pasukan berani mati sehingga anak panah yang bernama pasukan berani mati tidak dilepaskan oleh Gus Dur dan NU. Sholahuddin Wahid menyatakan bahwa potensi konflik pasca memorandum II menimbulkan konflik horisontal. Dengan sendirinya penyelesaiannya adalah fatwa *bughot* dan hukuman mati yang dibahas dalam *bahtsul matsail* harus ditolak. Wiro Sugiman menyatakan jumlah pasukan berani mati pendukung Gus Dur di Jawa Timur sebanyak 52.832 orang dan di Batam sejumlah 1000 orang, menunjukkan menguatnya penggunaan simbol keyakinan keagamaan sebagai komoditi politik.

Fatwa *bughot* (makar) dilekatkan pada lawan politik Gus Dur walaupun akhirnya tidak jadi diputuskan. Istigoshah dilakukan untuk mendukung Gus Dur tetapi pembahasan fatwa tentang *rusywah* (suap, korupsi) menjadi terkendala karena akan menyeret Gus Dur yang menerima dana dari zakat dari Keluarga Kasultanan Brunei. Keyakinan keagamaan dihadirkan dalam politik belah bambu. Politik belah bambu merupakan sebuah metafora untuk menyatakan tindakan politik 'siapa yang mendukung dibiarkan hidup, didukung, sedangkan yang menentang disingkirkan'. Di Indonesia, penerapan politik belah bambu dilakukan oleh Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu Nasakom (Maarif 1988:54-80). Pihak-pihak yang mendukung masuk dalam jaringan kekuasaan, sedangkan pihak yang melawan bukan saja disingkirkan dari lembaga-lembaga politik formal, tetapi partai mereka dibubarkan dan tokoh-tokoh mereka dipenjarakan bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Persaingan semakin menguat dengan hadirnya partai dengan simbol agama pada pemilu 1999 bahkan pada 2004 (Kompas 20 Juni 2002).

Menjelang digelarnya Sidang Paripurna DPR RI tanggal 30 Mei 2001, suhu politik memanas khususnya di Tapapl Kuda (Pasuruan). Pada hari Minggu, 27 Mei 2001, pukul 09.00 ribuan sekelompok massa mengendarai sepeda motor membawa pentungan, senjata tajam (pedang, clurit, pisau, dsb) berkeliling hampir seluruh penjuru kota. Senin 28 Mei 2001 terdapat aksi demo yang dilakukan oleh FAKK (Front Anti Kudeta Konstitusi) pendukung Gus Dur dengan berputar-putar sekitar alun-alun Bangil, menuju Pemda/Pemkot, dan DPRD untuk menentang



Sidang Istimewa. Massa mulai melakukan pengrusakan, pembakaran, pendudukan stasiun pemancar radio untuk menyampaikan aspirasinya. Kondisi itu direspon oleh Pemda, Kyai, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menurunkan spanduk yang provokatif dan kesepakatan 'segel' menolak Sidang Istimewa MPR pukul 22.00 wib. Hari Selasa, 29 Mei 2001 tersiar kabar bahwa massa PDIP dari luar kota akan menyerbu Pasuruan dan terdapat beberapa konsentrasi massa. Pada hari ini, terjadi pengrusakan terhadap identitas yang dionstruksi sebagai minna (kami) dan minkum (kamu). Kami adalah NU, pendukung Gus Dur, sedangkan kamu adalah pendukung MD, Amin Rais, dan pendukung Sidang Istimewa. Yang menarik, MAPOLRES menjadi sasaran amuk dengan dalih solidaritas untuk membebaskan Muammar yang tertangkap di Klentheng kemarin. Massa yang mendekat dikendalikan dengan prosedur polisi sehingga membubarkan diri, sebagian ditangkap dan diinterogasi. Versi Tim NU menyatakan prosedur tidak sesuai karena terjadinya kesepakatan pembebasan Muammar, terjadi penembakan dari belakang tanpa diawali tembakan peringatan. Kasus itu diselesaikan bersama NU, Polri, Pemda, tokoh-tokoh non muslim, terjadi kesepakatan yang isinya tidak ada pengerahan massa lagi. Kesepakatan itu dilanggar, pada hari Rabu, 30 Mei 2001, terjadi lagi kerumunan massa di depan Bioskop Kumala Teater. Kerumunan itu dihadang oleh satu kompi Brimob dan terjadi insiden penembakan. Massa melawan dengan melempar *bondet* (mercon untuk mencari ikan) dan merusak kantor Sub Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) Polres Pasuruan. Massa sebagian ditangkap oleh aparat dan tindakan kekerasan dipertontonkan di hadapan massa. Sidang Istimewa MPR akhirnya digelar dan Gus Dur dinyatakan lengser.

Versi Muhammadiyah melaporkan terjadinya amuk massa pada tanggal 28 Mei 2001 di SLTP dan SMU Muhammadiyah 3 Pandaan pada saat pelaksanaan EBTANAS hari pertama. Mereka melakukan pengrusakan bangunan, mebel, peralatan sekolah, mengambil pesawat telepon, buku perpustakaan, sepeda motor Yamaha Fiz-R milik Yunan seorang guru, termasuk uang EBTANAS Rp. 250.000,-. Di SMU dan SMK Muhammadiyah I Kota Pasuruan, massa pro Gus Dur dengan bersenjata tajam masuk ke sekolah pada saat EBTANAS sehingga para siswa histeris, ada yang nekat naik ke atap hingga seorang siswi terluka karena terjatuh dari atap. Kondisi itu menyebabkan pelaksanaan EBTANAS sesi kedua dibatalkan dan hari berikutnya lokasi dialihkan ke MAPOLRES, sedangkan yang SMK dipindah ke SMK Negeri Pasuruan. Massa masih nekat dan berusaha mengepung MAPOLRES dengan melempar *bondet*, mercon bantingan. Polri mengendalikan massa dengan tembakan peringatan dan berusaha menangkap massa. Bahkan, Kepala Kanwil Diknas Jatim berusaha mendampingi



siswa peserta EBTANAS mengambil kebijakan 'daurat', yaitu mengizinkan peserta tidak memakai seragam sekolah dan hanya membawa kartu peserta, boleh menyontek, tidak boleh nyontek. Sebagian siswi dibantu oleh teman-temannya menyelesaikan jawaban karena mengalami tekanan psikologis 'hanya menangis'. Di SMK Muhammadiyah 2 Kota Pasuruan menjadi sasaran amuk massa sehingga 25 siswi peserta EBTANAS diselamatkan melalui pagar belakang gedung, menaiki pagar setinggi 2,5 meter dan turun melalui tangga yang disiapkan penduduk di belakang gedung perguruan. Lokasi EBTANAS dipindah ke SMK Negeri Kota Pasuruan.

Aksi massa menjalar ke identitas Muhammadiyah yang lain, yaitu Panti Asuhan dan Mesjid Darul Arqam. Panti Asuhan Muhammadiyah Kraton Pasuruan (*Darul Aitam*) yang menampung 19 yatim dari Ambon. Penghuni panti ketakutan dan diungsikan ke Pendopo Kelurahan. Mesjid Darul Arqam dirusak dengan pentungan dan lemparan batu. Kaca jendela, pintu mesjid dan pagar serta perangkat lainnya hancur berantakan termasuk kotak infaq untuk Sumbangan Maluku. Yang terakhir tentu uangnya diambil. Rumah-rumah warga MD menjadi sasaran amuk massa seperti yang dialami oleh warga desa Blandongan. Rumah Setyohadi (tukang bangunan) sebagai Ketua Ranting PAN, Mudjianto (tukang bangunan) sebagai jamaah pengajian; Markasan (Guru SD) simpatisan MD, Saifudin (Guru SD) simpatisan MD dan Hamim (Pensiunan) sebagai anggota Muhammadiyah seluruh kaca, pintu, jendela, mebelernya rusak tak ada yang tersisa.

Sementara itu, tanggal 1 Juni 2001, Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi, Ketua PWNU Jatim Ali Machsan Moesa datang ke Pasuruan dan meminta maaf ke Pimpinan Muhammadiyah Pasuruan serta menyerahkan bantuan sebesar Rp. 10 juta dan Rp. 1,5 juta dari simpatisan NU. Uang itu tidak segera diterima oleh Drs. H. Gozali, ketua PMD Pasuruan melainkan diminta untuk diserahkan kepada Walikota Pasuruan dengan alasan semua kerusakan telah dilaporkan ke Pemkot. Alasan sebenarnya, Muhammadiyah masih berduka dan tidak etis kalau langsung diterima. Bantuan itu selanjutnya diserahkan kepada PMD oleh Walikota Pasuruan. Bantuan itu diterima sebagai bantuan Pemkot Pasuruan kepada PDM Kota Pasuruan.

Penggulingan Gus Dur ternyata menimbulkan konflik di Pasuruan. Konflik itu dikenal dengan **Pasuruan Kelabu**. Muhammadiyah, NU, PKB dan Kepolisian menjelaskan konflik itu berbeda. Versi MD tentang kasus kekerasan politik di Jawa Timur dikaji oleh Sophiaan dkk (2002) sedangkan versi NU dan PKB disajikan oleh Misbah (2001). Kepolisian sudah



mengetahui adanya konflik itu (Informasi Sat. IPP Polres Pasuruan No.Pol: R/INSUS/IV/V/2001/IPP, tanggal 26 Mei 2001; Laporan Atensia Sat. IPP Polres Pasuruan No.Pol.:R/LAPAT/04/V/2001/IPP, tanggal 26 Mei 2001; KIRKAT No. Pol.: R/KIRKAT/05/V/2001/IPP, tanggal 26 Mei).

Laporan konfidensial Kepolisian Daerah Jatim tanggal 21 Januari 2002 . Laporan itu untuk menjawab Surat No.: 4.393/SKPMT/X/01, tanggal 22 Oktober 2001 dari Komnas HAM, Ketua Sub Komisi Pemantauan kepada Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya untuk melaporkan kerusakan Pasuruan 28 s.d 30 Mei2001 terutama kematian Fatkhan. Wawancara dengan Pengurus DPC NU Pasuruan, KH..Mudjib Imron, Ketua GP Ansor H.Baidowi, Advokasi NU- Rafi AI Idrus, 8 Agustus 2001, saat pelaksanaan Konferensi DPC Ansor Pasuruan di Purwosari, dokumentasi korban oleh PCNU Kabupaten Pasuruan. Laporan Kapolda Jatim No.: R/972/XI/2001/Ditserse, tanggal 15 Nopember 2001 dan Surat Komandan POM Kodam V/Brawijaya No.: k/29 I/2002 tanggal 21 Januari 2002.; Surat Sekneg I.No.B /71/ SEKNEG/ KDN/X/ 2001, tanggal 17 oktober 2001 sebagai realisasi Surat Ketua Komnas HAM No.: 1273/SKPMT/TUA/IX/201, tanggal 12 September 2001, dan Surat Perintah Danpomdam V/Brawijaya No.: Sprint/230/XI/2001, tanggal 20 Nopember 2001 tentang penyelidikan Kasus Pasuruan. Pangdam V/Brawijaya melaporkan kepada Ketua Komnas HAM dengan No. K/29 I/2002, tanggal 11 Januari 2002. Laporan Kodam V Jatim No.: K/228/V/2002, tanggal 13 Mei 2002, konfidensial tentang penyerahan *visum et repertum* an. Sdr Fatkhan. Tulisan pada kain rentang yang didokumentasikan menyatakan '*Gus Dur Mundur, sedulur tawur*', *Darah Amin Rais halal'Bughot*', *Gus Dur Mundur, Muhammadiyah hancur, Germone Amien Rais, Senoke Akbar Tanjung*', *Amin Rais bajingan sing ndak trimo nyango Mayangan*', '*Hai Amin Rais! Kau Tidak Pantas di Sebut Manusia, Tapi Lebih Pantas di Sebut Dajjal/Fir'aun.Pongo; Tak Beleh Koen*'.Versi Polisi dan Militer menyatakan penanganan konflik Pasuruan sudah memenuhi standar dan prosedur kepolisian. Masing-masing pihak, yaitu MD dan NU menyatakan pendapatnya yang benar .

Korban konflik itu terdiri dari mati, 1 orang (Fatkhan), 132 orang berhasil diamankan, 9 orang di antaranya mengalami luka tembak, 7 orang diserahkan berkasnya ke Pengadilan, 20 ditahan di Polres Pasuruan dalam kasus tipiring,, 18 dilepas 130 tersangka dengan pasal 170 KUHP dan UU Darurat 12/1951, 16 orang dikenakan tipiring ditahan di Polda jatim, 2 orang dilepas.



Laporan data kerugian material dari Tim Investigasi gabungan NU Cabang Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan terdiri atas: rumah makan Karunia milik warga Muhammadiyah (Rp.100 juta), Depot Anda milik Keluarga Aisyiah Kraton (Rp. 76.670.500,-), SMU-SMK Muhammadiyah Tapaan (Pasuruan) (Rp. 16. juta), SLTP-SMK 2 Muhammadiyah (Pasuruan) (Rp 17.500.000,-), SD, SLTP Muhammadiyah (Bangil) (Rp. 1 juta), SLTP-SMU Muhammadiyah Pandaan (Rp.25 juta), Kantor PDIP Raci dan Pasuruan (Rp.170 juta), Kantor PPP Kotamadya Pasuruan (Rp.75 juta), Mesjid Darul Arqom Pasuruan, Gereja Katolik St.Antonius (Rp.6.265.500,-), GPIB PNIEL(Rp. 666.957.500,-), Gereja Kristen Jawi Wetan (Rp. 693.223.000,-) dan Toko Perak Mas (Rp.30 juta)..

Yang menarik, penjelasan tentang rusaknya gereja bisa dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2: Perkembangan tempat ibadah di Kabupaten Pasuruan 1998-2003

No.	Tahun	Mesjid	Langgar	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
1.	1998	1208	7353	480	38	14	5
2	1999	1254	7541	481	38	14	5
3	2000	1254	7541	481	40	14	5
4	2001	1278	7570	481	40	14	5
5	2002	1280	7600	482	36*	20	5

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pasuruan Periode Tahun 1998-2003, hal. 152-153

Keterangan: Jumlah gereja pada tahun 2002 mengalami penurunan karena ada 4 (empat) gereja rusak akibat kekerasan politik 'Pasuruan Kelabu'. Kekerasan itu berhubungan dengan pelengseran Gus Dur dari jabatan presiden pada tanggal 28 -30 Mei 2001 'Pasuruan Kelabu'. Dalam laporan itu tidak dijelaskan faktor penyebab berkurangnya jumlah gereja tersebut.

Laporan intel Polres Pasuruan menyatakan implikasi dari peristiwa itu adalah terdapat ketegangan antara MD dan NU melalui konstruksi subyektif masing-masing pendukungnya. Anggota DPR RI dari Pasuruan Rojil Gufron memberikan pernyataan yang kontroversial yang menduga kuat pendukung Partai Amanat Nasional (Alfan alias Edi dan lainnya tidak dikenal) sebagai pelaku utamanya sehingga menyulut reaksi dari masyarakat. Pernyataan dia mengacu pada temuan Tim Investigasi NU Pasuruan(Saksi Suyitno, Drs. Sa'ud Afandi)Moch.Syueb SP). Pernyataan tendensius segera dibantah dengan sejumlah testimoni tandingan dengan judul 'Muhammadiyah Korban Kekerasan Politik'. Bahkan, warga MD di Pandaan sudah siap siaga dengan semprotan air raksa untuk mempertahankan diri. Ketegangan reda dengan tindakan represif dari Polri dan militer.Konstruksi identitas MD seperti lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah pengurus MD dan PAN, dan tempat ibadah dijaga ketat oleh aparat. Kuatnya tindakan represif dari Polisi menimbulkan reaksi, yaitu



munculnya fatwa haram bagi warga NU untuk menjadi anggota Polri. Fatwa itu muncul karena *illat* (konteks) dominasi Polri terhadap warga NU, sedangkan MD berada di pihak yang dilindungi. Relasi kuasa itu menjadikan warga NU merasa didzalimi. Reaksi yang muncul adalah gerakan perlawanan melalui fatwa tersebut.

Di sisi lain, menurut informan mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan dalam pidato pelantikan pengurus PAC Gondang Wetan menjelaskan bahwa Gus Dur itu bukan manusia biasa melainkan sebagai wali. Kewalian Gus Dur bisa dilihat ketika keluar dari istana memakai celana kolor saja. Celana kolor itu sebagai *isyaroh*, yaitu sebentar lagi Jakarta akan banjir. Ternyata, satu bulan kemudian Jakarta banjir, semua orang memakai celana kolor. Bersama Ulama membangun bangsa!. Permasalahannya, mengapa ulama direduksi menjadi kyai atau ulama identik dengan kyai. Bukankah ulama dilekatkan kepada semua orang yang mempunyai ilmu pengetahuan? Jadi tidak terbatas pada kyai saja. Menurut saya, realitas itu menunjukkan adanya hegemoni kyai dalam masyarakat. Artinya, setiap kyai mempunyai pengikut dengan segala keyakinan keagamaan masing-masing. Dengan sendirinya, kyai mempunyai medan kharisma sendiri. Medan itu bisa sebatas lokal, regional, dan nasional. Masyarakat di luar medan kharisma itu menjadi wilayah yang tidak tersentuh dan mempunyai keyakinan sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Raziq, Ali, Abd.
2001 "Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara" dalam Kurzman, Charles (ed), *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Yayasan Paramadina, hal.11-17
- Amstrong, Karen
2001 *Berperang Demi Tuhan Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*. Jakarta dan Bandung: Penerbit Serambi Ilmu Semesta dan Mizan, Cetakan Kedua
- Balandier, George
1996 *Antropologi Politik*, terjemahan, Jakarta: CV. Rajawali Press
1996 'Agama dan Kekuasaan' dalam Kartodirdjo, Sartono (peny).1984.*Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3S, hlm.1-23
- Bourdieu, P
1984 *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Massachusetts: Harvard University Press



- Cassanely, Lee.V,
 1984 "Qat: Changes in the Production and Consumption of a Quasilegal Commodity in Northeast Africa" dalam Appadurai, Arjun (ed), *The Social Life of Things Commodities in Cultural Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 236-260
- Cohen, Abner
 1969 Customs and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in a Yoruba Town. Berkeley: University of California Press
- Dhofier, Zamaksyari
 1982 *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES
- Foucault.M.
 1984. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon
- Geary, Patrick
 1990 "The Sacred Commodities: The Circulation of Medieval Relics" dalam Appadurai, Arjun (ed), *The Social Life of Things Commodities in Cultural Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 169-194
- Geertz, Clifford
 1989 *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya
- Hefner, R.
 1999 *Geger Tengger Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LkiS
- Jay, Robert R
 1963 *Religion and Politics in Rural Central Java*, Yale University, Southeast Asian Studies, Cultural Report Series, No. 12
- Mc Glynn, Frank dan Arthur Tuden (ed)
 2000 *Pendekatan Antropologi Pada Perilaku Politik*, Jakarta: UI Press
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan
 2002 *Pasuruan dalam Angka 2002*. Pasuruan: Dinas Statistik Kabupaten Pasuruan
- Russell, Bertrand
 1988 *Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial Baru*, terjemahan Hasan Basari, Jakarta: YOI
- Suparlan, Parsudi
 1995 *The Javanese in Suriname Ethnicity in an Ethnically Plural Society*. Tempe: Arizona University
 2000 *Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Balitbang DEPAG
- Ward, Ken
 1974 "The 1971 Election in Indonesia: An East Java Case Study", *Paper on Southeast Asia*, No.2, Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University
- Weber, Max
 2000 *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, terjemahan Yusuf Priyasudiarja, Surabaya: Pustaka Prometheus



Jurnal

Firth. Raymond

1980 'Spiritual Aroma'. Jurnal AA

Haryatomo. 2003. 'Bourdieu: Menyingkap Kebohongan Penguasa'. *Basis* Desember 2003

Suparlan, Parsudi

1981/1982 "Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama", *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, X (1), hal. 1-16

1989 'Antropologi Politik: Pendekatan dan Ruang Lingkup'. *Jurnal Ilmu Politik* 5, AIPI, LIPI, dan PT. Gramedia, hlm.3-14

1999 "Keyakinan Keagamaan dalam Konflik antarsukubangsa, *Antropologi Indonesia*, 66, 23-33

2000 "Ethnic and Religious Conflict in Indonesia", *The Indonesian Journal for Muslim Cultures*, Vol.I,No.2, hal. 23-33

Dokumentasi Kliping Surat Kabar

'Kliping Peta Politik di Indonesia', tahun XIII, No. 5, Mei 2001, Centre for Strategies and International Studies

Dokumentasi Kronologi Peristiwa Politik 1999-2001, RiDEP, Jakarta

Kliping Peristiwa di Pasuruan 2002-2004. Pasuruan: Dinas Informasi dan Komunikasi

Laporan Intel Polres Pasuruan (Rahasia)

